

**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT DELAY**Robert Jao<sup>1)</sup>, Feby Pebriyanti Crismayani<sup>2)</sup><sup>1)</sup> Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Atma Jaya, Makassar<sup>2)</sup> Alumni Jurusan Akuntansi Universitas Atma Jaya, Makassar**ABSTRACT**

The aims of this study was to investigate the effect of corporate governance mechanisms on audit delay. Corporate governance mechanisms discussed in research is size of the board of commissioners, independent board of directors, audit committee meeting, institutional ownership, and managerial ownership. This study used samples from non-financial company listed in Indonesia Stock Exchange with a purposive sampling technique. The research data was collected from annual report within a period 2015-2017. The method of analysis was multiple linear regressions. The results of this study indicated that size of the board of commissioners, audit committee meeting, and institutional ownership had negative and significant influence on audit delay. While independent board of commissioners had positive and significant influence on audit delay. However, managerial ownership had not significant influence on audit delay.

**Keywords:** *corporate governance mechanisms, audit delay*

**1. PENDAHULUAN**

Perusahaan publik di Indonesia diwajibkan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu dan laporan tersebut telah diaudit oleh auditor independen. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada pasal 2 yang menyatakan bahwa emiten wajib menyusun laporan keuangan, pasal 4 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus diaudit, dan pasal 7 yang menyatakan bahwa Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu publikasi informasi keuangan perusahaan tergantung pada waktu penyelesaian audit (Sidharta & Nurdina, 2017)

Audit dalam laporan keuangan dilakukan agar keandalan dan jaminan atas laporan tersebut dapat dipercaya (Praptika & Rasmini, 2016). Audit laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang telah berlaku khususnya di Indonesia. Auditor memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam mengaudit laporan keuangan sehingga tidak terjadi *audit delay*. Akan tetapi, hal tersebut masih saja tidak dapat terpenuhi dari auditor dikarenakan beberapa kondisi yang memang menjadi penghambat dalam pengungkapan pelaporan audit tersebut.

Pada tahun 2016, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi berupa denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 tercatat karena belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2015 (Pasopati, 2016). Pada tanggal 3 Juli 2017, BEI menghentikan sementara perdagangan efek (suspensi) di pasar reguler dan tunai terhadap 17 perusahaan tercatat. Suspensi tersebut berdasarkan pemantauan manajemen BEI hingga 29 Juni 2017, terdapat 17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 (Melani, 2017). Salah satu penyebab terjadinya keterlambatan tersebut adalah *audit delay*. Audit yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Waktu penyelesaian audit akan berdampak pada ketepatan waktu publikasi informasi.

Alfrah (2016) menyatakan bahwa efektivitas mekanisme *corporate governance* perusahaan membentuk ketepatan waktu laporan audit. Nelson & Shukeri (2016) juga menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai mekanisme *corporate governance* yang kuat dapat mengurangi risiko pada klien dan membatasi penggunaan pengujian substantif sehingga meningkatkan ketepatan waktu audit.

Dewan komisaris merupakan salah satu komponen dalam mekanisme *corporate governance*. Faishal & Hadiprajitno (2015) menyatakan dewan komisaris memiliki fungsi melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Kumara (2015) berpendapat bahwa dengan semakin banyak dewan komisaris akan semakin banyak pula jumlah anggota yang akan lebih fokus terhadap masing-masing

<sup>1</sup> Korespondensi penulis: Robert Jao, HP 081355524161, jao\_robert@hotmail.com

departemen. Hal ini menyebabkan auditor lebih mudah memeriksa laporan keuangan sebab auditor tidak memerlukan waktu lebih untuk mencari tahu kebenaran dalam laporan keuangan tersebut karena anggota dalam perusahaan tersebut telah teliti dalam pengungkapan sehingga *audit delay* tidak terjadi.

Ardanty & Sofie (2015) menyatakan tujuan terbentuknya komisaris independen untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan demi melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lainnya. Carcello *et al.* (2002) mengatakan bahwa dewan yang lebih independen akan mengambil tanggung jawab lebih besar untuk memantau aktivitas perusahaan, sehingga mengurangi penilaian auditor terhadap risiko pengendalian pada perusahaan dan menyebabkan auditor mengurangi pekerjaannya, lalu meningkatkan ketepatan waktu audit.

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.4/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari tiga (3) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Kuslihaniati & Hermanto (2016) mengatakan bahwa rapat komite audit merupakan pertemuan yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Adanya pertemuan yang sering dilakukan oleh Komite Audit akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera mengarahkan sumber daya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah secara tepat waktu. Hal ini akan mempermudah auditor dalam memeriksa laporan keuangan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya (Risdiyani & Kusmuriyanto, 2015). Permanasari (2010) menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalisir dengan kepemilikan institusional. Investor institusional memiliki potensi untuk memengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut. Pihak institusi dapat menuntut penyelesaian laporan audit dengan segera karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Fitria (2016) menyatakan kinerja manajer dapat dimotivasi dengan menerapkan kebijakan manajerial diperusahaan di mana kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham, sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer setara dengan para pemegang saham. Fitria (2016) menyatakan dengan semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi manajer untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan. Penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu akan mendorong harga saham karena pengguna dapat menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya kepemilikan manajerial perusahaan tidak akan menunda pelaporan keuangan dan hal itu berarti manajer telah bekerja dengan baik sehingga auditor dapat memeriksa laporan keuangan dengan mudah dan tidak terjadi *audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alfraih (2016) yang menganalisis hubungan mekanisme *corporate governance* perusahaan dengan *audit delay* pada perusahaan di Kuwait. Penelitian ini menambahkan peran komite audit yang diukur dengan jumlah rapat dengan pertimbangan peran komite audit dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa laporan tahunan perusahaan tahun 2015-2017. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria: Perusahaan non keuangan yang terus-menerus terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017, perusahaan menerbitkan laporan tahunan secara lengkap dan memiliki informasi yang dibutuhkan mengenai data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, seperti ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *audit delay*. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 175 perusahaan dengan total unit analisis sebanyak 525 data tahun perusahaan. Peneliti mengeluarkan 20 data yang terdeteksi outlier sehingga data yang digunakan sebanyak 505 data tahun perusahaan.

Faishal & Hadiprajitno (2015) menyatakan dewan komisaris memiliki fungsi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha

perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Ukuran dewan komisaris diukur dengan banyaknya anggota dewan komisaris dalam perusahaan (Fitria, 2016).

Kuslihaniati & Hermanto (2016) menyatakan dewan komisaris independen adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta dapat berperilaku secara independen dalam mewakili perusahaan di dalam maupun di luar sesuai dengan ketentuan. Variabel ini diukur dengan jumlah independen dewan komisaris dibagi dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris (Kuslihaniati & Hermanto, 2016).

Peraturan OJK No. 55/POJK.4/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala. Rapat komite audit dipilih dengan pertimbangan keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Variabel ini diukur menggunakan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit (Kumara, 2015).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya (Risdiyani & Kusmuriyanto, 2015). Ardianty & Sofie (2015) mengukur variabel ini dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan total saham yang beredar.

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005). Sidharta & Nurdina (2017) mengukur variabel ini dengan jumlah kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan dibagi dengan total saham yang beredar.

*Audit delay* adalah jangka waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan. Variabel ini diukur berdasar pada waktu yang dibutuhkan untuk mendapat laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independent (Praptika & Rasmini, 2016).

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$AD = \beta_0 + \beta_1UDK + \beta_2 IDK + \beta_3RKA + \beta_4KI + \beta_5KM + \varepsilon$$

Keterangan:

AD	=	<i>Audit Delay</i>
UDK	=	Ukuran Dewan Komisaris
IDK	=	Independensi Dewan Komisaris
RKA	=	Rapat Komite Audit
KI	=	Kepemilikan Institusional
KM	=	Kepemilikan Manajerial
$\beta_0$	=	Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	=	Koefisien Regresi
$\varepsilon$	=	<i>Error</i>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *audit delay* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Dewan Komisaris (UDK)	505	2.00	12.00	4.28	1.81
Dewan Komisaris Independen (DKI)	505	0.17	1.00	0.41	0.11
Rapat Komite Audit (RKA)	505	1.00	51.00	6.48	5.51
Kepemilikan Institusional (KI)	505	1.17	99.98	73.41	22.39
Kepemilikan Manajerial (KM)	505	0.00	89.45	5.17	14.14
<i>Audit Delay</i> (AD)	505	21.00	94.00	73.03	13.61

Sumber: Ouput SPSS (2018)

Hasil statistik deskriptif menunjukkan perusahaan sampel memiliki dewan komisaris sebanyak 4 sampai 5 orang serta 41.26% dari total dewan komisaris merupakan komisaris independen. Komite audit

dalam perusahaan sampel mengadakan rapat yang dilakukan sebanyak 6 sampai 7 kali dalam setahun. Rata-rata kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan 73.41%, kepemilikan saham oleh pihak manajemen 5.17%, dan sisanya merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak lain seperti keluarga atau publik. Auditor menyampaikan laporan auditan pada hari ke 73. *Audit delay* perusahaan sampel masih di bawah 120 hari atau 30 April yang merupakan batas yang ditetapkan oleh OJK dalam laporan tahunan emiten.

Nilai *adjusted R* dalam penelitian ini sebesar 0.326. Hal ini menunjukkan 32.6% variabilitas *audit delay* (AD) dapat dijelaskan oleh variabilitas ukuran dewan komisaris (UDK), dewan komisaris independen (DKI), rapat komite audit (RKA), kepemilikan institusional (KI), dan kepemilikan manajerial (KM). Sisanya (100% - 32.6% = 67.4%) dijelaskan variabel-variabel lain di luar model ini.

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2 Hasil Uji t**

Variabel	B	Sig.	Keterangan
Ukuran Dewan Komisaris (UDK)	-3.153	0.000	Signifikan
Dewan Komisaris Independen (DKI)	18.153	0.000	Signifikan
Rapat Komite Audit (RKA)	-0.531	0.000	Signifikan
Kepemilikan Institusional (KI)	-0.088	0.001	Signifikan
Kepemilikan Manajerial (KM)	0.029	0.479	Tidak Signifikan

Sumber: Output SPSS (2018)

Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh sebesar -3.153 dan tingkat signifikansi sebesar 0.000, menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Semakin banyak dewan komisaris akan mendorong anggota yang berfokus terhadap masing-masing departemen. Dewan komisaris akan memantau dan berkoordinasi dengan manajemen untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Dewan komisaris mendorong auditor independen untuk mempercepat penyelesaian audit agar nilai dari informasi tersebut tidak berkurang. Banyaknya dewan komisaris mengindikasikan bahwa semakin efektif pengawasan terhadap perusahaan, sehingga laporan yang disajikan juga semakin transparan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumara (2015) serta Faishal & Hadiprajitno (2015) yang menemukan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Dewan komisaris independen memiliki pengaruh sebesar 18.351 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.000, lebih kecil dari alpha 0.05 bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Pengawasan dari dewan komisaris independen membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan manajemen. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan seperti hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan demikian dewan komisaris independen lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan penelitian Daoud *et al.* (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Afify (2009) juga menemukan hasil bahwa dewan komisaris independen secara signifikan mempengaruhi *audit report lag*. Dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham. Namun, hasil penelitian tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Faishal dan Hadiprajitno (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Rapat komite audit memiliki pengaruh sebesar -0.531 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.000, lebih kecil dari alpha 0.05 bahwa rapat komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Komite audit yang sering melakukan pertemuan, akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan tentang isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera mengarahkan sumber daya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah ini secara tepat waktu. Dengan demikian, semakin banyaknya rapat komite audit, akan semakin cepat teratasinya masalah yang ada dalam proses pembentukan laporan. Pembaharuan suatu masalah yang dibahas komite audit secara langsung akan menekan manajemen dalam transparansi informasi sehingga pemegang saham dapat mengetahui informasi dalam perusahaan. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faishal & Hadiprajitno (2015) serta Kuslihianiati dan Hermanto (2016) yang menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Semakin banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit maka *audit delay* juga dapat diminimalisir.

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh sebesar -0.088 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.001, lebih kecil dari alpha 0.05 bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Investor institusional memiliki potensi untuk memengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut. Melalui kepemilikan saham, investor akan melakukan kegiatan monitoring secara efektif. Pihak institusi juga dapat menuntut penyelesaian laporan audit dengan segera karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka pernyataan atas laporan keuangan juga semakin dibutuhkan. Investor institusi juga mencegah manajer dari distorsi. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan atau tindakan lain yang dapat merugikan investor yang dilakukan manajemen. Kemudian saat pencegahan ini terjadi, maka auditor dapat lebih mudah dalam memeriksa laporan keuangan tersebut dan menghindari *audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfraih (2016) serta Suparsada & Putri (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Artinya, semakin banyak kepemilikan saham institusional akan menyebabkan auditor lebih cepat menyampaikan laporan audit.

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh sebesar 0.029 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.479, lebih besar dari alpha 0.05 bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *audit delay*. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial cenderung menuntut ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan audit. Namun adanya kepemilikan saham manajerial akan mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian dari pengambilan keputusan yang salah, sehingga penyampaian laporan audit semakin lama. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan kepemilikan manajerial dalam perusahaan belum secara maksimal memberikan kontribusi atau tidak menjamin kecepatan auditor dalam menyampaikan laporan audit. Kondisi ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan manajerial belum mampu memengaruhi *audit delay*. Swami & Latrini (2013) sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan pada *audit report lag*. Hal tersebut berarti, ada atau tidaknya kepemilikan manajerial tidak akan mempengaruhi panjangnya *audit report lag* dalam suatu perusahaan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang tinggi cenderung menurunkan lamanya waktu auditor dalam menyampaikan laporan auditor independen.
2. Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen membuat auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memeriksa dan menerbitkan laporan auditor independen.
3. Rapat komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan rapat komite audit yang tinggi akan mempersingkat waktu penyampaian laporan auditor independen.
4. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa besaran kepemilikan institusional cenderung lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian laporan auditor independen.
5. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *audit delay*. Kepemilikan saham yang dimiliki manajer belum mampu memengaruhi cepat lambatnya penyampaian laporan auditor independen.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Afifi, H. (2009). Does Implementing Corporate Governance Have Any Impact? Empirical Evidence From Egypt. *Journal of applied Accounting Research*. Vol. 10(1), pp. 56-86.

- Alfraih, M. M. (2016). Corporate Governance Mechanisms and Audit Delay in a Joint Audit Regulation. *Journal of Financial Regulation and Compliance*. Vol. 24 (3), pp.292-316
- Ardanty, R. D., & Sofie. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Universitas Trisakti*.
- Boediono, G. S. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Carcello, J. V., Hermanson, D. R., Neal, T. L., & Riley, R. A. (2002). Board Characteristics and Audit Fees. *Contemporary Accounting Research Vol 19(3)*, pp. 365-384.
- Daoud, K. A. A., Ismail, K. N. I. K. & Lode, N. A. (2014). The Timeliness of Financial Reporting among Jordanian Companies: Do Company and Board Characteristics, and Audit Opinion Matter? *Asian Social Science*. Vol 10(13), pp. 191-201
- Faishal, M., & Hadiprajitno, P. B. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. *Diponegoro Journal of Accounting Vol 4 (4)*.
- Fitria, F. (2016). Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan (Financial Distress) dan Good Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi. *STIE Perbanas*.
- Kumara, R. A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). Universitas Diponegoro.
- Kuslihaniati, D. F., & Hermanto, S. B. (2016). Pengaruh Praktik Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Audit Report Lag. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 5(2)*.
- Melani, A. (2017, Juli 03). Belum Sampaikan Laporan Keuangan, BEI Suspensi 17 Saham Emiten. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3009365/belum-sampaikan-laporan-keuangan-bei-suspensi-17-saham-emiten>
- Nelson, S. P., & Shukeri, S. N. (2016). Corporate Governance and Audit Report Timeliness: Evidence from Malaysia. *Accounting in Asia. Research in Accounting in Emerging Economies*. Vol. 11, pp.109 - 127
- Pasopati, G. (2016, 06 30). Telat Sampaikan Lapkeu, BEI Suspensi Saham 18 Perusahaan. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160630145045-92-142141/telat-sampaikan-lapkeu-bei-suspensi-saham-18-perusahaan>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Permanasari, W. I. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. *Universitas Diponegoro*.
- Praptika, P. Y., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Risdiyani, F., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi. *Accounting Analysis Journal Vol 4(3)*.
- Sidharta, R. Y., & Nurdina. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Audit Delay pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya di Bursa Efek Indonesia. *Global Vol. 2(1)*.
- Suparsada, N. P. Y. D. & Putri, I. A. D. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Swami, N. P., & Latrini, M. Y. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Wardhani, A. P. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. *Universitas Diponegoro*.